

LEGITIMASI POLITIK TOKOH AGAMA: KAJIAN INTERPRETATIF MASYARAKAT MULTIAGAMA DI KABUPATEN NGANJUK

Nilna Fauza¹

nilnafauza@iainkediri.ac.id

Abstract

The dynamics of the political and state development of the Indonesian nation has always been side by side with religion and religious leaders. For religious circles, especially in East Java, the role of the kiai in politics is still often debated. The relational continuum between religious and political figures can be divided into two epicenters. The community in Nganjuk Regency can be categorized as a multi-religious society with religious and belief characteristics. The views of religious leaders who are members of the Nganjuk Regency FKUB socio-religiously represent social phenomena on various life problems, including politics. As subjects who have religious roles, functions, and social status, their views on politics can be studied as a basic capital in further understanding the attitudes and behavior of religious leaders in politics on the one hand, and the attitudes and behavior of people towards religious and political figures on the other. another.

In general, this study aims to examine the legitimacy of religious politics according to the interpretation of the multi-religious society of Nganjuk district. In particular, this study aims to examine and describe two, namely (1) the views of the multi-religious community of Nganjuk district on the political legitimacy of religious figures; and (2) the factors that shape the views of the multi-religious community of Nganjuk district on the political legitimacy of religious figures. This research was conducted with a qualitative approach. The type of research used is field research. The data analysis in this research is interpretive analysis and content analysis using deductive-inductive and inductive-deductive thinking lines on an ongoing basis. The data in this case are substantively-contextually interpreted using a sociological approach. The primary data source is the views of the multi-religious community represented by members of the Nganjuk FKUB regarding the political legitimacy of religious figures. The data collection technique used in this research is to use interview and documentation techniques. The data analysis technique used to process the research data is the qualitative data analysis of the Miles and Huberman flow model.

Keywords: political legitimacy, religious leaders, multi-religious

Abstrak

Dinamika perkembangan politik dan kenegaraan bangsa Indonesia sejak dahulu hampir selalu berdampingan dengan agama dan tokoh agama. Bagi kalangan agama, khususnya di Jawa Timur peran kiai dalam dunia politik masih sering diperdebatkan. Kontinum relasional antara tokoh agama dan politik dapat dibedakan menjadi dua episentrum. Masyarakat di Kabupaten Nganjuk dapat dikategorikan masyarakat yang multiagama dengan ciri agama dan kepercayaan. Pandangan para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB Kabupaten Nganjuk secara sosio religius merupakan representasi gejala sosial terhadap berbagai permasalahan kehidupan, termasuk di dalamnya politik. Sebagai subjek yang memiliki peran, fungsi, dan status sosial religius, maka pandangan mereka terhadap politik dapat dikaji sebagai modal dasar dalam memahami lebih lanjut sikap serta perilaku tokoh agama dalam berpolitik di satu sisi,

¹ Dosen Tetap IAIN Kediri

dan sikap serta perilaku masyarakat terhadap tokoh agama dan politik pada sisi yang lain.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legitimasi politik agama menurut interpretasi masyarakat multiagama kabupaten Nganjuk. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan dua yakni (1) pandangan masyarakat multiagama kabupaten Nganjuk terhadap legitimasi politik tokoh agama; dan (2) faktor-faktor yang membentuk pandangan masyarakat multiagama kabupaten Nganjuk terhadap legitimasi politik tokoh agama. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dalam penelitian ini analisis interpretatif (*interpretive analysis*) dan analisis isi (*content analysis*) dengan menggunakan alur berpikir deduktif-induktif dan induktif-deduktif secara berkesinambungan. Data dalam hal ini secara substantif-kontekstual diinterpretasikan dengan menggunakan kerangka berpikir pendekatan sosiologis. Sumber data primer berupa pandangan-pandangan masyarakat multiagama yang diwakili oleh anggota FKUB Kabupaten Nganjuk tentang legitimasi politik tokoh agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data penelitian ini adalah analisis data kualitatif model alir Miles dan Huberman.

Kata kunci: legitimasi politik, tokoh agama, multiagama

A. Pendahuluan

Dialektika tentang agama dan politik telah berlangsung sejak lama. Dalam lintas sejarah Islam, agama pernah jadi tunggangan kaum Mu'tazilah untuk menindas *ahlus-sunnah*; pernah pula digeret ke nuansa pertikaian antara Damaskus dan Madinah, ketika Abdullah bin Zubair mengorganisir gerakan perlawanan terhadap rezim Umayyah di Damaskus; hingga akhirnya mereda ketika zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ketegangan itu kemudian merebak kembali di akhir era Dinasti Umayyah, hingga munculnya Dinasti Abbasiyah.

Relasi antara agama dan politik di Indonesia menjadi salah satu fenomena yang menjadi pusat perhatian berbagai kajian ilmiah dan dimaknai dalam konteks zamannya. Dinamika perkembangan politik dan kenegaraan bangsa Indonesia sejak dahulu hampir selalu berdampingan dengan agama dan tokoh agama.² Keterlibatan tokoh agama dalam praktik politik menjadi trend dalam konfigurasi kehidupan bernegara di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, relasi ini sejatinya mengalami beberapa fase, fase pertama, pada masa kolonial, agama berperan ganda: sebagai legitimasi kolonialisme sekaligus

² Dalam literatur keilmuan Islam, setidaknya ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Pertama, paradigma yang menyatakan Islam tidak mengatur kehidupan bernegara. kedua, Islam adalah agama yang paripurna, ia mencakup segalanya termasuk politik. Ketiga, Paradigma ini berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1-2; Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. x; Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000), h. 127-128.

kritik sosial.³ Banyak tokoh agama, khususnya muslim, yang bekerja dengan pemerintah kolonial. Namun pada saat yang bersamaan juga banyak di antara mereka yang menjadi pengkritik dan pemberontak kolonial.

Fase kedua, pada zaman orde lama, pemimpin negara kala itu, satu sisi mengakomodasi tokoh-tokoh muslim (khususnya dari nahdlatul ulama), tetapi pada waktu yang bersamaan tidak mengakomodir tokoh-tokoh muslim lain (khususnya dari masyumi) yang kontra dengan kekuasaannya.

Fase ketiga, pada masa orde baru, pemimpin negara tidak melirik kelompok Islam meskipun pada awalnya kelompok Islam digandeng untuk mengantarkan jalan kekuasaan. Kepemimpinan lebih tertarik menggandeng kelompok abangan-kejawen dan kalangan militer. Baru pada awal 1990-an, ia tertarik “melirik” Islam dengan menggandeng kelompok kelas menengah teknokrat di bawah bendera ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) setelah terjadi friksi dengan sejumlah petinggi militer. Masa orde baru dulu juga tidak memberi ruang gerak secuilpun untuk perkembangan “Islam politik” meskipun mendukung gerakan “Islam kultural” yang apolitis. Pasca rezim ini, kebebasan berekspresi dan berserikat yang dulu ditutup rapat, kini dibuka kembali lebar-lebar. Hal ini mengakibatkan Indonesia seperti banjir kelompok-kelompok Islam ekstrim-konservatif.

Fase keempat, di era reformasi, saat dibuka kembali kran demokrasi di Indonesia, setelah beberapa saat mengalami mati suri, beberapa tokoh agama (baca: kiai) kembali menembus kancah perpolitikan nasional. Pada saat yang sama umat Islam berpeluang untuk memainkan peran dalam percaturan politik secara signifikan. Termasuk didalamnya adalah para kiai. Gelombang reformasi telah memancing para kiai “turun gunung” dan turut meramaikan arena politik. Tak hanya percaturan politik nasional, namun juga di tingkat daerah. Baik sebagai pelaku maupun menjadi lahan sasaran politisi dalam membangun basis dukungan politik. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan Islam yang menjadi pengikut setia kiai, banyak partai politik yang menempatkan kiai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi *vote getter* dalam pemilu.⁴

Fenomena paslon dan “cawan” dari kelompok ulama dan tokoh agama sudah menjadi trend pasca runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998. Sejak itu, lantaran ada

³ Kala itu peran tokoh agama sangat sentral dalam menentukan arah politik bangsa, suatu contoh Resolusi Jihad yang di keluarkan oleh Kiai Hasyim Asy’ari dalam melawan penjajah Belanda juga merupakan keterlibatan ulama selaku tokoh agama dalam politik dengan tujuan merdeka dari penjajahan.

⁴ Nur Syam, *Kiai, Santri, dan Politik* (<http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=17>) diakses 15 Agustus 2018.

peluang dan kesempatan untuk menjadi politisi atau birokrat, banyak para tokoh agama dan ulama merasa nyaman di percaturan politik. Hal yang sama kini terulang kembali, pada percaturan politik pemilihan presiden di tahun 2019, dengan mengakomodir salah satu tokoh agama sebagai pasangan politik.

Bagi kalangan agama, khususnya di Jawa Timur peran kiai dalam dunia politik masih sering diperdebatkan. Kontinum relasional antara tokoh agama dan politik dapat dibedakan menjadi dua episentrum. Pertama, sebagian kalangan berpendapat bahwa kiai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kegiatan politik. Secara empiris, masih dapat ditemukan tokoh agama dan ulama yang memilih menjadi "golput" dan menjaga jarak dengan dunia politik-kekuasaan. Ulama jenis ini lebih memilih mengurus umat, memberdayakan warga, dan menjauhi hingar-bingar dunia politik praktis kekuasaan.

Kedua, sebagian kalangan menyatakan sebaliknya, tidak ada alasan bagi kiai untuk meninggalkan politik praktis, sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri. Melalui berbagai peran yang diembannya baik dalam bidang keagamaan dan bidang sosio kultural, kiai kemudian tampil sebagai patron yang memiliki kekuasaan hierarkis atas masyarakat.⁵ Kecenderungan munculnya permasalahan pada saat tokoh agama berpolitik, lebih disebabkan karena bias penggunaan otoritas dan penggunaan legitimasi, bukan pada substansi keterlibatan tokoh agama dalam politik praktis itu sendiri. Penggunaan otoritas dan legitimasi yang dimaksudkan berfokus pada penyuaran kaidah-kaidah kebenaran, bukan pada memanfaatkan kaidah-kaidah kebenaran itu sendiri. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah SAW. dengan “qul al-haqqa walaw kaana murran”⁶ (konsisten terhadap kebenaran meski dengan resiko yang sangat berat).

Menurut Lazarsfeld, dan ilmuwan lain dari Mazhab Kolumbia, mencatat bahwa faktor sosiologis lebih menentukan preferensi pemilih seseorang dalam perspektif politik. Lebih lanjut, mazhab ini melihat bahwa masyarakat merupakan bangunan kelompok bertingkat, dan karenanya hierarkis. Implikasinya, perilaku masyarakat kemudian dibentuk oleh aturan-aturan sosial yang dilandaskan pada pengelompokan serta karakteristik sosiologis, yakni (terutama) status sosial, agama, pendidikan, serta kelompok etnik/

⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Politik Santri : Cara Merebut Hati Rakyat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.

55

⁶ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنِي خَلِيلِي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسَبْعِ أَمْرَيْنِ بِخَيْبِ الْمَسَاكِينِ وَالذُّنُوفِ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ قَوْفِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّجَمَ وَإِنْ أَدْبَرْتُ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوَمَةً HR. Ahmad 5: 159. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *shahih*, namun sanad hadits ini hasan karena adanya Salam Abul Mundzir.

kedaerahan/ bahasa. Oleh karena itu eksplorasi pada sebuah komunitas tentang faktor yang melatarbelakangi preferensi pemilihan tokoh agama (baca: kiai) dalam dunia politik menjadi sebuah hal yang menarik untuk dilakukan.

Masyarakat di Kabupaten Nganjuk dapat dikategorikan masyarakat yang multiagama dengan ciri keberagaman agama. Namun demikian, potensi keberagaman ini dapat terkelola dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Nganjuk. Sikap toleran dan empati sosial dapat berkembang dengan baik melalui berbagai aktifitas sosial, politik, maupun pemerintahan. Salah satu indikator sikap toleran dalam menyikapi keberagaman adalah tingkat konflik tentang problem agama rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Tentu hal ini tidak terlepas dari keberadaan organisasi sosial yang dapat menjadi tolok ukur hal di atas yakni Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB). Keanggotaan tokoh agama dalam Forum tersebut terdiri dari tokoh-tokoh lintas agama dan organisasi di Kabupaten Nganjuk. Keberagaman dan kemajemukan itulah yang menggambarkan kondisi masyarakat multiagama.

Pandangan para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB Kabupaten Nganjuk secara sosio religius merupakan representasi gejala sosial terhadap berbagai permasalahan kehidupan, termasuk di dalamnya politik. Sebagai subjek yang memiliki peran, fungsi, dan status sosial religius, maka pandangan mereka terhadap politik dapat dikaji sebagai modal dasar dalam memahami lebih lanjut sikap serta perilaku tokoh agama dalam berpolitik di satu sisi, dan sikap serta perilaku masyarakat terhadap tokoh agama dan politik pada sisi yang lain. Signifikansi penelitian ini semakin penting dilakukan untuk mengetahui akseptabilitas dan oposisionalitas masyarakat terhadap politik tokoh agama

B. Pembahasan

1. Kajian Legitimasi Politik

Kata Legitimasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang artinya hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebuah membenaran.⁷ Secara istilah legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan.⁸ Legitimasi politik dapat diartikan sebagai keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang kekuasaan maupun pemerintah adalah benar-benar orang yang dimaksud. Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka), 341

⁸ Eman Hermawan, *Politik Yang Benar, Teori, Kritik, Nalar*, (Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001), 5

Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang ada. Yang menjadi obyek legitimasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik sedangkan dalam arti sempit legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. David Easton mendefinisikan legitimasi sebagai keyakinan dari anggota masyarakat yang mentaati dan menerima berbagai kebijakan yang dibuat dan haknya telah dipenuhi oleh penguasa sebuah rezim.⁹

Sebagaimana dijelaskan Gaetano Mosca bahwa pengakuan terhadap elit yang memiliki legitimasi adalah terdapatnya suatu keyakinan yang menunjukkan mengapa *'the rullers'* (pemimpin atau penguasa) dipatuhi kepemimpinannya. Pemimpin atau aturan yang keluar dari pemimpin akan dipatuhi jika pemimpin memiliki legitimasi.¹⁰

Legitimasi merupakan sebuah konsep keterikatan yang kuat antara pemimpin/pemerintah dan masyarakat yang dipimpin. Jadi pada intinya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan pemimpin yang sah untuk memerintah, membuat kebijakan, serta melaksanakan keputusan politik. Poin penting lainnya adalah legitimasi seorang pemimpin akan didapatkan ketika dia sudah melaksanakan apa yang menjadi hak bagi warga negara. Bertolak dari pengertian politik yang dikemukakan oleh Joice Mitchel yakni politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya, maka proses legitimasi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, negara dan pemerintah. Sebelum pengambilan keputusan kolektif dan pembuatan kebijaksanaan umum tersebut ialah bagaimana pemerintah dapat diterima dan diakui kedaulatannya oleh seluruh masyarakat.

Secara istilah, ada beberapa definisi menurut para ahli. Menurut Deliar Noer, politik adalah segala bentuk aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut hakekat politik menunjukkan perilaku manusia, baik berupa ucapan, tingkah laku, maupun segala bentuk aktifitas yang memiliki tujuan mempengaruhi atau mempertahankan sebuah tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan sebagai alatnya. Kekuasaan

⁹ Sania Alonso, Keane, John and Merkel, *The Future of Representative Democracy* (New York: Cambridge University Press, 2011), 80.

¹⁰ Haryanto, *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*, (Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005), 145.

¹¹ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta : Rajawali, 1983), 6.

dibutuhkan dalam berpolitik agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut Deliar Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat dari sudut perilaku manusia, tapi juga melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, di mana mempunyai konsep yang lebih luas.

Sedangkan Menurut Miriam Budihardjo, politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹² Jadi politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri.

Dari definisi Deliar Noer maupun Miriam Budihardjo, pada prinsipnya terdapat persamaan, yakni kedua pakar ini sama-sama melihat politik sebagai suatu kegiatan atau aktifitas, namun ada perbedaan dalam hal bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Definisi politik Deliar Noer melibatkan kekuasaan sedangkan Miriam Rahardjo lebih menekankan pada proses dalam melaksanakan dan mencapai tujuan dari politik itu sendiri

Apabila digabungkan, maka legitimasi politik ialah penerimaan dan pengakuan masyarakat akan kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan suatu negara. Legitimasi ini memiliki peranan penting dalam sistem kekuasaan, mengingat dengan legitimasi yang diperolehnya tersebut, seseorang maupun kelompok dapat dengan mudah menjalankan pengaruhnya.

Dengan mendapatkan legitimasi, seorang pemimpin atau penguasa akan dihadapkan dalam dua situasi. *Pertama*, ketika pemimpin atau penguasa dapat menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan atau kehendak masyarakat yang dipimpin, maka kepercayaan tinggi akan didapatnya, sehingga kehidupan politik akan damai, aman, dan harmonis. *Kedua*, ketika pemimpin yang disahkan tidak mampu menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan rakyat, maka akan menjadi bumerang bagi pemimpin ini. Hasilnya, kehidupan politik jauh dari kata aman dan sejahtera. Bahkan justru dapat menjadi tombak kehancuran sebuah kelompok masyarakat.

Menurut Easton, terdapat tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara terus menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan umum. Ketiga obyek legitimasi itu meliputi: komunitas politik, rezim dan pemerintahan.¹³

¹² Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1982), 8.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami....*, 93.

Tiga sumber utama legitimasi menurut Max Weber (1964), yaitu: “*people may have faith in a particular political or social order because it has been there for a long time (tradition), because they have faith in the rulers (charisma), or because they trust its legality – specifically the rationality of the rule of law* (orang bisa memiliki kepercayaan dalam tatanan politik atau sosial tertentu untuk waktu yang lama (tradisi), karena mereka memiliki kepercayaan kepada penguasa (karisma), atau karena mereka percaya pada legalitas-khususnya rasionalitas aturan hukum)”. Berdasarkan teori tersebut, bahwa pemerintah mendapatkan keabsahan sangat tergantung pada pandangan masyarakat berdasarkan kebiasaan (tradisi), karena faktor karismatik, dan atau disebabkan oleh kerangka pandang terhadap rasionalitas aturan hukum

2. Bentuk-bentuk Legitimasi

Legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dibahas dalam kajian Ilmu Politik, sebab legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Seandainya suatu kekuasaan tidak terlegitimasi, maka tentu akan muncul pembangkangan politik yang membuat keadaan kepemimpinan tidak kondusif dalam bekerja.¹⁴ Menurut Heywood di era modern, legitimasi dipahami dari satu sudut pandang terkait dengan keyakinan dan sudut pandang perilaku politik saja, bukan pada tataran tentang kewajiban moral masyarakat dalam melihat legitimasi.¹⁵

Menurut Zippelius dalam Franz Magnis—Suseno, bentuk legitimasi dilihat dari segi obyek dapat dibagi atas dua bentuk yakni:

a. Legitimasi materi wewenang

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya: untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah? Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua Lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik: yakni dalam *hukum* sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif dan dalam kekuasaan (eksekutif) *negara* sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan.

b. Legitimasi subyek kekuasaan

Legitimasi ini mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat

¹⁴ Ibid., 29

¹⁵ Andrew Heywood, *Politik*. Edisi Ke-4; dalam bahasa Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),

Menurut Andrain dalam Ramlan Subakti berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe yaitu:¹⁶

- a. Legitimasi tradisional merupakan pengakuan masyarakat terhadap pemimpinnya yang dianggap sebagai keturunan bangsawan atau berdarah biru yang dipercaya harus memimpin masyarakat.
- b. Legitimasi ideologi adalah pengakuan masyarakat terhadap pemimpin dengan kesamaan ideologi yang dianut dan diharapkan pemimpin dapat menjalankan ideologi tersebut. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi pancasila.
- c. Legitimasi kualitas pribadi merupakan kualitas pemimpin yang kharismatik dan memiliki prestasi pada bidang tertentu sehingga mendapatkan dukungan dan pengakuan dari masyarakat.
- d. Legitimasi prosedural adalah masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Legitimasi instrumental hampir sama dengan material yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.

Hermawan dalam bukunya *Politik Yang Benar, Teori, Kritik, Nalar* untuk menjadi seorang pemimpin atau penguasa legitimasi dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu secara simbolis, prosedural, dan material. Secara simbolis yaitu dengan menggunakan simbol-simbol untuk memanipulasi nilai-nilai, moral, tradisi dalam masyarakat. Secara prosedural adalah dengan melalui pemilihan umum sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan yang sah dan terlegitimate. Secara material yaitu melalui memberikan material kepada masyarakat dengan menjanjikan kesejahteraan, jabatan dan lainnya.¹⁷

3. Pandangan Masyarakat Multiagama Kabupaten Nganjuk Terhadap Legitimasi Politik Tokoh Agama

Indonesia merupakan negara bangsa (Nation State). Fakta ini tidak bisa diingkari. Ini berarti Indonesia memiliki karakter masyarakat yang bersifat plural, baik suku, adat-istiadat, ras maupun agama. Keanekaragaman agama tidak dapat dihindari, sehingga mewadahi keberagaman agama dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan, dan ini

¹⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu*, 97.

¹⁷ Eman Hermawan, *Politik Yang Benar*, 97

terwakili dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dalam berkehidupan dan berkebangsaan terutama yang menyangkut dengan ranah kenegaraan termasuk di dalamnya berpolitik, tentu tidak bisa dilepaskan dari pandangan mereka sebagai representasi multiagama atau multireligius di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa subyek penelitian tentang persepsi masyarakat multiagama yang diwakili oleh FKUB Nganjuk tentang keterlibatan tokoh agama diperoleh data sebagai berikut:

Terhadap pernyataan mengenai keterlibatan tokoh agama dalam politik, subyek penelitian yang juga sebagai ketua FKUB menyatakan pendapatnya bahwa adalah wajar bagi seorang tokoh agama (dalam hal ini kiai) berkiprah di dunia politik baik sebagai aktor maupun sebagai partisipan. Menurut Sholihin, para kiai tersebut berpolitik menggunakan pendekatan fiqh siyasah, yakni berpolitik karena tanggung jawab sebagai tokoh agama dalam mengatur urusan dunia dan menjaga agama, sebagaimana perang yang dijalankan Nabi Muhammad ketika menjadi pemimpin negara di Madinah.

Sebenarnya para tokoh agama, dalam bahasa saya adalah kiai, aktif di partai politik justru karena sadar secara fiqh bahwa berpolitik sangat penting dalam menentukan nasib umat dan Islam ke depan. Para kiai dalam berpolitik berlandaskan pada kaidah *An-nas ala dini mulukihim* (manusia akan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran para pemimpinnya). Apabila pemimpin kita seorang yang ngerti agama, maka masyarakat akan mengikuti sepak terjang beliau.¹⁸

Berdasarkan pendapat responden Solihin sebagai ketua FKUB, ia menyetujui kiai berkiprah di dunia politik, dengan menaruh harapan sepak terjang sang tokoh agama yang memimpin dapat diikuti oleh masyarakatnya. Sholihin menambahkan dalam pernyataannya

Seperti halnya wakil presiden yang terpilih saat ini mbak, adalah sosok tokoh agama. Nah, diharapkan beliau ini nantinya mampu memberi contoh yang baik bagi masyarakatnya.¹⁹

Secara khusus beliau menyebutkan, bahwa KH. Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden yang terpilih saat ini merupakan tokoh agama yang berkecimpung di dunia perpolitikan, yang diharapkan mampu menjadi uswah hasanah bagi masyarakat Indonesia secara umum.

Senada dengan hal tersebut, Afrizal salah satu anggota FKUB yang berafiliasi pada Organisasi keagamaan NU menyatakan bahwa:²⁰

Legitimasi tokoh agama dalam perpolitikan itu sangat diperlukan, tentunya tokoh agama yang memiliki pandangan yang moderat untuk menjaga

¹⁸ Wawancara dengan Sholihin, Ketua FKUB Kabupaten Nganjuk, 2 September 2019.

¹⁹ Wawancara dengan Sholihin, Ketua FKUB Kabupaten Nganjuk, 2 September 2019.

²⁰ Wawancara dengan Afrizal al-Adzim, Anggota FKUB Nganjuk, 2 September 2019.

balancing dari serangan-serangan kaum radikal. Tokoh agama, dalam hal ini kiai harus berada pada garda terdepan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Afrizal dalam hal ini sepakat dengan pandangan Sholihin, bahwa tokoh agama yang memiliki faham moderat dibutuhkan kiprahnya dalam dunia politik agar mampu menjaga keseimbangan dalam menangkal kaum ekstrimisme dan kaum radikal.

Mentik Darsono tokoh dari agama Konghucu berpandangan, bahwa:²¹

Menurut saya kok tidak apa-apa tokoh agama terlibat dalam urusan politik, namun berasal dari kalangan akar rumput, bukan dari golongan elite. Sebagaimana diprediksi dalam kitab *Shang Shu*, pemimpin yang terlebih dahulu digembleng oleh asam garam kehidupan rakyat jelata, “akan mau berempati terhadap kesusahan orang kecil” (*zhi xiao ren zhi yi*). Karenanya, ia akan sebisa mungkin membuat kebijakan populis yang pro wong cilik sebab dirinya pernah dan turut merasakan kemelaratan yang sama.

Menurut Mentik Darsono tokoh agama yang layak dijadikan pemimpin harus berasal dari kalangan bawah, sebab ia sudah merasakan manis pahitnya hidup sebagai masyarakat bawah, sehingga dalam memberikan kebijakan cenderung pro-rakyat kecil.

Mohammad Syihab dan Ahmad Wathon, tokoh dari Muhammadiyah juga berpendapat, bahwa:

Setiap orang termasuk kiai lumrahnya memiliki suatu ideologi yang menjadi sakral dalam hidupnya. Kiai merupakan tokoh yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap ilmu agama, konsekuensinya adalah posisinya yang selalu mendapat perhatian terhadap pengajaran dan pengamalan ilmu yang dimilikinya. Bahkan kalau kita melihat dari teks-teks ayat dalam Al-Qur'an memang seharusnya pemimpin bagi umat muslim itu adalah seorang muslim juga. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mewajibkan demikian, salah satunya adalah QS. Al-Maidah ayat 51 yang ramai diperbincangkan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tafsir dalam ayat ini, terutama dalam kata *awliya* Ada yang sebagai teman dekat ada juga yang menafsirkan dengan pemimpin. Oleh karena itu, menurut saya legitimasi politik kiai, sangat penting dan sangat saya dukung. Memilih pemimpin memang harus yang beragama Islam. Bukan kafir. Sebab kita sedang mencari sosok yang mampu mengayomi, melindungi, dan menjaga martabat hidup orang banyak.²²

Pandangan Mohammad Syihab dan Ahmad Wathon dari tokoh Muhammadiyah ini senada dengan pandangan Sholihin dan Afrizal yang ikut melegitimasi dan mengamini tokoh agama dalam berpolitik, hanya saja Mohammad Syihab dan Ahmad Wathon memberikan pandangannya bahwa justru kiai berpolitik merupakan sebuah keniscayaan,

²¹ Wawancara dengan Mentik Darsono, Pengurus FKUB Nganjuk, 4 September 2019.

²² Wawancara dengan Mohammad Syihab dan Ahmad Wathon, Pengurus FKUB Nganjuk, 4 September

pemimpin haruslah dari tokoh agama Islam, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah: 51.

Berbeda pandangan dengan yang dituturkan dari ustadz Khoiruddin dari LDII, beliau berpendapat bahwa:

Kiai itu mewarisi sifat zuhud nabi, biasanya akan menjauhi cinta pada hal-hal keduniawian secara berlebihan, sederhana dan tidak terpengaruh persoalan-persoalan duniawi. Mestinya tokoh agama, sibuk mengurus umatnya, santrinya saja. Para kiai yang menerjunkan diri ke dunia politik dan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan politik, justru meninggalkan pesantren. Implikasinya, hubungan personal mereka dengan para santri dan umat, malahan pelan-pelan tercerabut. Dan lama kelamaan akan berimbas pada kharisma kiai secara umum.²³

Sedangkan pandangan ustadz Khoiruddin ini berlawanan dengan pendapat 4 tokoh sebelumnya, di mana menurut beliau tidak seharusnya seorang tokoh agama terjun ke dalam dunia politik, hal ini disebabkan karena 2 hal. Yang *pertama* tokoh agama, dalam hal ini kiai merupakan pewaris para nabi, yang diantara sifatnya adalah zuhud (menjauhi hingar bingar duniawi). *Kedua*, tokoh agama memiliki umat yang harus dibimbing terus menerus secara istiqomah. Jika umat dan santrinya terabaikan, justru akan melunturkan kepercayaan umat dan santri terhadap kewiraian seorang tokoh agama.

Senada dengan yang dipaparkan oleh Romo Timotius, salah satu pendeta dari Kabupaten Nganjuk, yang juga pengurus FKUB Berpendapat,

Tokoh agama biarlah mengurus jamaah dan umatnya, jika banyak tokoh agama yang nyemplung ke dunia politik, lantas bagaimana nasib umat nya? Apalagi jika tokoh agama tersebut di kemudian hari malah berperilaku politik yang menyimpang, terlibat korupsi misalnya, bagaimana dengan umatnya? Pasti menjadi tidak hormat lagi terhadap tokoh agama. Tokoh agama tersebut sejatinya mempunyai pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang dangkal; serta tidak memiliki kharisma sebagai pemimpin umat. Ia hanya mau menjadikan umat sebagai sapi perah untuk kepentingan diri sendiri.²⁴

Pandangan Romo Timotius sama dengan ustadz Khoiruddin yang tidak melegitimasi aktifitas tokoh agama di kancah perpolitikan.

Berdasarkan pemaparan beberapa tokoh dari organisasi keagamaan tersebut, terdapat dua kubu dalam dalam memandang perilaku atau aktifitas politik tokoh agama. Kubu yang menerima dan menolak.

Dalam masyarakat Islam, tokoh agama, yang biasa disebut dengan kiai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan sebuah masyarakat. Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat

²³ Wawancara dengan Khoiruddin, Pengurus FKUB Nganjuk, 7 Agustus 2019

²⁴ Wawancara dengan Romo Timotius, Pengurus FKUB Nganjuk, 3 September 2019.

karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris Nabi (waratsat al-anbiya).

Ajaran agama menekankan keyakinan, kepercayaan, ritual peribadatan, dan moralitas. Sedangkan politik menekankan aturan main dalam perebutan dan pembagian kekuasaan dalam konteks kehidupan bernegara. Kedua hal ini saling berkait kelindan, sehingga agama selalu menjadi isu seksi dalam sebuah kontestasi politik. Umat beragama akan mudah digerakkan untuk melakukan sebuah tindakan atas nama agama. Apalagi jika menyentuh istilah-istilah ritus-dogma yang transenden seperti jihad, kafir, musyrik dan sejenisnya. Ada semacam kesadaran primordial bagi setiap pemeluk agama, dan ini sangat sensitif untuk digerakkan jika dibungkus dengan label agama. Dan, dalam politik selalu berlaku prinsip *machavellian*: semua sah dan halal untuk mencapai tujuan. Sekali lagi, Pilkada DKI telah membuktikan dogma dan adagium ini.

Perdebatan soal “agama dan politik” sebetulnya sudah lama terjadi, jauh sebelum sekarang ini. Bahkan sejak awal sejarah Islam, yaitu ketika para sahabat (*khulafaurrasyidin*) dihadapkan pada soal calon pemimpin (baca: khalifah) sepeninggal Nabi. Saat itulah persoalan di seputar agama dan politik mulai menjadi wacana yang dipertentangkan. Munculnya kelompok Syi’ah dan Khawarij tidak lepas dari persoalan tersebut. Dalam konteks Indonesia, tema-tema politik Islam bergulir mencapai klimaksnya pada perdebatan dalam konstituante pada paruh kedua dasawarsa 1950-an. Sekarang persoalan ini mencuat kembali lantaran bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada agenda “membangun Indonesia baru” yang demokratis, terbuka dan tidak otoriter seperti yang terjadi selama dalam kekuasaan rezim Orde Baru. Dalam merespon soal agama dan politik, di kalangan umat Islam terdapat dua arus pemikiran besar yang berbeda.

Ormas Islam, ulama dan kiai banyak yang tergoda ikut merebut posisi, diperebutkan, bahkan terkadang tampak terseret untuk memasuki gelanggang pertarungan politik yang lebih luas. Mereka berpolitik dan mencemplungkan diri dalam dunia yang penuh manuver dan intrik. Kiai betul-betul menempatkan kharisma dan dukungan umatnya dalam melakukan bargaining politik. Dengan berbagai cara, kiai mengontrol, menjanjikan bahkan menghukum, lewat fatwa haram dan murtad, umatnya agar mendukung kiprah politik dirinya.

Perdebatan tentang keterlibatan Kiai dalam politik selalu berada dalam dua kutub pendapat yang kontradiktif. Begitu juga dalam pandangan masyarakat multiagama yang ada di kabupaten Nganjuk, yang dalam hal ini diwakili oleh masyarakat FKUB. Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam

memberikan pandangan. Terdapat dua pandangan tentang legitimasi tokoh agama dalam berpolitik. Pendapat yang *pertama*, mengasumsikan bahwa Kiai, bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lainnya. Hal ini didukung oleh argumentasi teologis yang membenarkan pilihan politik praktis. Dengan adanya QS. Al-Maidah ayat 51. Pendapat ini semakin kukuh apalagi didukung oleh realitas semakin banyaknya Kiai yang terjun dalam dunia politik langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan pendapat *kedua*, tidak melegitimasi politik tokoh agama. Bagi kalangan ini menyayangkan sosok kiai yang sebelumnya istiqomah dan sudah cukup sibuk mengurus ‘dalam negeri’ pesantren dan umat, figur kiai tiba-tiba menjadi selebriti politik. Selain ada anggapan bahwa dunia politik penuh dengan intrik, lumpur dan noda, sebaik dan sebersih apapun orang, termasuk kiai ketika masuk politik praktis maka mau tidak mau dia akan terkena percikan lumpur itu karena dalam dunia politik mestilah terjadi perebutan kepentingan untuk kekuasaan.

4. Faktor-Faktor Yang Membentuk Pandangan Masyarakat Multiagama Kabupaten Nganjuk Terhadap Legitimasi Politik Tokoh Agama

Sebuah Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuknya, diantaranya adalah pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Menurut Affan Gaffar, Terdapat dua pendekatan dalam mengelaborasi hal-hal yang mempengaruhi keputusan dalam memilih terhadap tokoh yang berkiprah di dunia politik. Pendekatan sosiologis menyatakan bahwa preferensi politik termasuk di dalamnya preferensi pemberian suara di kota pemilihan merupakan produk dari karakteristik sosial ekonomi, seperti profesi, kelas sosial, agama, dan lainnya. Dengan kata lain, latar belakang seseorang atau kelompok orang seperti jenis kelamin, kelas sosial, ras, etnik, agama, ideologi, dan daerah asal merupakan variabel independen yang mempengaruhi keputusan memilih. Selanjutnya untuk pendekatan psikologis, mengungkapkan bahwa keputusan memilih terhadap partai politik atau kandidat didasarkan pada respons psikologis, seperti kualitas performa kandidat, performa pemerintah yang saat itu berkuasa.

Berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan di lapangan, faktor-faktor yang membentuk pandangan pengurus FKUB dalam melegitimasi dan tidak melegitimasi terhadap politik tokoh agama merupakan gabungan dari pendekatan sosiologis dan psikologis.

Faktor yang membentuk pandangan dari pendekatan sosiologis adalah sakral, dan rasa berbangsa satu atau kebinekaan. Sepintas keduanya tampak berlawanan, namun sejatinya tidak.

Faktor sakral ini di dalamnya mencakup ideologi keagamaan dan ideologi kenegaraan. Berkaitan dengan urusan politik, menjadi suatu pertanyaan ketika sebelumnya telah dibahas bahwa dalam urusan politik bagi umat Islam wajib hukumnya untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Di satu sisi timbul opini bahwa Islam tidak mentoleransi perbedaan dan merasa sebagai kelompok. Menurut Afrizal bahwa sentimental terjadi manakala mengaitkan isu politik dengan isu keagamaan mengingat Islam sebagai agama mayoritas memiliki doktrin tertentu dalam hal politik. Doktrin tersebut dianggap bisa mengganggu iklim persaingan politik yang sehat dan bisa membunuh mimpi anak-anak non muslim yang bercita-cita untuk menjadi pemimpin politik. Oleh karena itu tokoh agama (kiai) yang memimpin.

Beliau menyimpulkan bahwa tidak ada kontradiksi antara negara dengan agama Islam khususnya untuk menjadikan identitas keagamaan sebagai bahan pertimbangan dalam berpolitik. Hal itu juga diyakini tidak akan mempengaruhi kebhinekaan yang sudah sejak lama dijunjung tinggi di Indonesia. Dalam memahami ayat di atas bahwa sesungguhnya ajaran Islam sangat menghargai adanya perbedaan, karena memang perbedaan adalah suatu keniscayaan dan ketentuan Allah. Dalam perbedaan itu kita dituntut untuk saling berbuat baik antar sesama. Namun dalam hal politik, ada ayat-ayat lain yang menjadi pengecualian sehingga umat muslim dilarang untuk menjadikan orang non muslim sebagai pemimpinnya. Hal yang demikian tidak berarti merusak kebhinekaan karena merupakan ajaran agama dan setiap warga negara berhak menjalankan ajaran agamanya masing-masing

Faktor personal dalam dunia politik bagi sebagian orang menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh. kapasitas intelektual. Ulama adalah sosok pembelajar, yang tak pernah bosan mengkaji dan mengamalkan ilmu, serta giat mengaktifkan majelis ilmu. Bahkan, lebih jauh, ulama di dalam Alquran disebutkan tidak semata memadai secara intelektual, tetapi juga memiliki self control yang kuat dalam menjalani tugas keumatan, yakni takut kepada Allah Ta'ala (QS 35: 28).

Tidak sedikit terutama bagi masyarakat awam yang memilih pemimpin karena melihat seseorang yang diidolakannya mengajak untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Konsekuensinya adalah dia menjadi pendukung dan bersikap secara buta karena tidak melalui pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Pentingnya sosok personal yang dianggap bisa mempengaruhi perilaku politik seseorang memang disadari betul oleh setiap aktor politik. Kiai sebagai tokoh agama dianggap menjadi daya tarik

tersendiri karena dikenal oleh banyak kalangan dan dianggap bisa menyentuh lapisan masyarakat yang sedikit alergi terhadap dunia politik. Berdasarkan pendapat-pendapat Shoolihin dan Afrizal disimpulkan ulama tak semata cerdas secara kognitif, tapi juga sangat cerdas secara emosional dan spiritual, sehingga kecerdasan intelektual yang dimiliki mampu mendorongnya berkiprah secara lebih baik, lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada diri, keluarga, kelompok, dan golongannya. Direkomendasikannya ulama dalam kontestasi politik 2019 merupakan sebuah harapan sekaligus jawaban untuk perubahan Indonesia.

Adapun faktor yang membentuk pandangan delegitimasi politik tokoh agama ada 3, yaitu Kekhawatiran terjerumus kepentingan kekuasaan, dan komunikasi eksternal individu.

Kiai adalah sosok yang wira'I dengan segala sikap kesederhanaannya, dan tugasnya yang mengemban amanah untuk mengayomi umatnya. ulama identik dengan dunia dakwah dan tarbiyah, memberikan mauidhah kepada umat dan mengawal moral masyarakat. Sehingga, ulama tak sepatutnya terjun ke dunia politik praktis, di mana pernah dalam masa perjalanan bangsa ini, politik identik dengan ketidaksucian, demikian pandangan ustadz Khoiruddin.

Faktor berikutnya adalah komunikasi eksternal individu di mana saat ini media sosial berperan besar dalam memberikan informasi negatif bagi tokoh agama yang berkiprah di dunia politik. Internet dan media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya bagi warga kelas ekonomi menengah ke atas. Kerap kali media sosial juga memperkeruh suasana politik, akibat berita-berita hoax yang menghiasi media sosial. Media sosial digunakan untuk menyerang lawan politik, akibatnya beberapa informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenrannya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap tokoh agama yang berkiprah di dunia politik. Muruah kiai pun ikut diserang. Hal ini terjadi pada KH. Ma'ruf Amin ketika masa pemilihan pilpres tahun 2019.

C. Penutup

Melalui hasil penelitian dan pengolahan data serta pengkajian lebih dalam mengenai pandangan Pandangan Masyarakat Multiagama Kabupaten Nganjuk Terhadap Legitimasi Politik Tokoh Agama, disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Masyarakat Multiagama yang terwakili oleh FKUB Kabupaten Nganjuk Terhadap Legitimasi Politik Tokoh Agama terbagi menjadi dua kutub, yakni kelompok yang mendukung tokoh agama dalam berpolitik dan kelompok yang

menolak tokoh agama dalam berpolitik. Alasan yang paling banyak digunakan kelompok pendukung tokoh agama dalam berpolitik adalah kiai bisa berperan mencerdaskan umat melalui komunikasi politik dan bahasa politik. Ketika misi Kiai berpolitik adalah amar ma'ruf nahi munkar, maka kerja Kiai lebih fokus pada strategi menyelesaikan kemungkaran yang bisa dirasakan bagi umat. Sebaliknya, alasan paling dominan kelompok yang tidak mendukung bahwa gelanggang politik sangatlah kotor, bagi tokoh agama yang memiliki tugas mengemban tarbiyah pesantren dapat berakibat pada hilangnya muruah kiai, dan pengabaian para santrinya di pesantren.

2. Terdapat 2 faktor yang membentuk pandangan masyarakat multiagama FKUB Kabupaten Nganjuk dalam melegetimasi politik tokoh agama, yakni faktor sakral (ideologi agama) dan faktor kebinekaan. Sedangkan faktor yang membentuk pandangan masyarakat multiagama FKUB Kabupaten Nganjuk dalam tidak melegitimasi politik tokoh agama, yakni faktor Kekhawatiran terjerumus kepentingan kekuasaan dan komunikasi eksternal individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Alonso, Sania, Keane, John and Merkel, *The Future of Representative Democracy* New York: Cambridge University Press, 2011.
- Arifi, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bruinessen, Martin Van, *Urban Sufisme*, Rajawali Press: Jakarta, 2008.
- Budihardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1982.
- Creswell, J.W., *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach* (Third Edition). Terj. Achmad Farwaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* Jakarta : PT RajaGrafinda Persada, 2008.
- Farid, Miftah, "Perilaku Sosial Politik Kiai di Tengah Masyarakat Transisi Kasus di Wilayah Cirebon dan Bandung" dalam *Mimbar*, Vol. 21., No. 2, April 2005.

- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, PT. Dunia Pustaka Jaya: Jakarta, 1983.
- Haryanto, *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta : Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005.
- Hasan, Nor, “Agama dan Kekuasaan Politik Negara”, *Jurnal KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 22, No. 2., Desember, 2014.
- Hermawan, Eman, *Politik Yang Benar, Teori, Kritik, Nalar*, Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001.
- Heywood, Andrew, *Politik*. Edisi Ke-4; dalam bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT.Gramedia, 2010.
- Lubis, Saiful Akhyar, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Masruhan, “Pemikiran Kiai NU Tentang Relasi Agama dan Negara”, *Jurnal al-Qanun*, Vol. 12., No. 1, Juni 2009.
- Milles & Huberman, *Qualitative Research Methodology*. New York: SAGE Publisher, 1992.
- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mu’iz, Usman Abdul, *Tarbiyah Siyasah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Inter media, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Keilmuan; Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1995.
- Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangtarta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Politik Santri : Cara Merebut Hati Rakyat*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Muzakka, M. Syaifullah, *Persepsi Santri Terhadap Keterlibatan Kiai Dalam Politik (Studi Penelitian di Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*, Jombang: Universitas Darul Ulum, 2012.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta : Rajawali, 1983.
- Patoni, Achmad, *Peran Kiai Pesantren dalam Parpol*, Jogjakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2007.

- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Rasyid, Hamdan, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*, Jakarta: Pustaka Beta, 2007.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana: Yogyakarta, 2009.
- Salehudin, Ahmad, *Islam Budaya Lokal, Zaman Islam Di Jawa*, Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam Yogyakarta.
- Setiawan, Deny dan Bahrul Khoir Amal, “Membangun Pemahaman Multikultural dan Multiagama Guna Menangkal Radikalisme di Aceh Singkil” dalam Jurnal *al-Ulum*, Vol. 16, No. 2 Desember 2016.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Smith, Donald Eugene, *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis* Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Sutiono, *Benturan Budayaisam, Puritan dansinkretis*, PT. Komasa Media nusantara: Jakarta, 2010.
- Syam, Nur, *Kiai, Santri, dan Politik* (<http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=17>) diakses 15 Agustus 2018.
- Tafiqurrahman dan Fathul Himan “Kepercayaan Mahasiswa Santri Terhadap Kiai dalam Perspektif Psikologi Perkembangan”, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Vol. 9, No. 1, April 2014.
- Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000.
- W. J. S., Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkolis, 1999.
- Zaprul Khan, “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 2, No. 1, Mei 2014